

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RINDA EMILLYZA

2007/88757

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Nama : **Rinda Emillyza**
Nim/BP : **88757/2007**
Program Studi : **Akuntansi**
Keahlian : **Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas : **Ekonomi**

Padang, Juli 2012

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Svofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

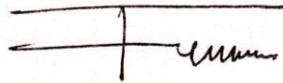
Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah**

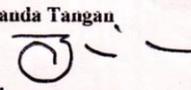
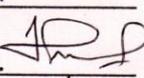
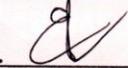
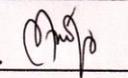
Nama : Rinda Emillyza

BP/NIM : 2007/88757

Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 September 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Erly Mulyani, SE, M.si, Ak	3. 
4. Anggota	: Nurzi Sabrina, SE, M.Sc. Ak	4. 

ABSTRAK

Rinda Emilyza (2007/88757) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. 1) pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan keuangan pemerintah, 2) pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, dan 3) pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah 45 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *Simple Random Sampling*, sebanyak 31 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu 2 orang staf bagian akuntansi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah sebagai variabel endogen, dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah sebagai variabel eksogen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for Windows*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif dari kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,394 > 1,6716$ dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) Pengaruh signifikan positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,164 > 1,6716$ dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$ (H_2 diterima), dan (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,343 > 1,6716$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan SKPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi dan SPIP yang memadai kedepannya. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat terhadap nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak Ketua Prodi dan Bapak Sekretaris Prodi Akuntansi
3. Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

5. Orang tua ku Ir.Suhaimi dan Bartihailis yang telah memberikan do'a, perhatian , dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Kakak dan adik-adikku yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI ,KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	16
A. Landasan Teori	16
1. Pelaporan Keuangan Pemerintah	16
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah	16
b. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah ...	18
c. Entitas Pelaporan	19
d. Dasar Hukum Laporan Keuangan	19
e. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah	21
f. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah	23
2. Nilai Informasi	24
a. Pengertian Nilai Informasi.....	24
b. Unsur-Unsur Kualitas Informasi.....	26

c. Keterandalan	31
3. Kapasitas Sumberdaya Manusia	31
a. Pengertian Kapasitas Sumberdaya Manusia.....	31
b. Karakteristik Kapasitas Sumberdaya Manusia	37
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	38
a. Teknologi Informasi	38
1). Teknologi	38
2). Informasi	39
3). Teknologi Informasi	39
1). Keunggulan Teknologi Informasi.....	40
2). Kelemahan Teknologi Informasi	41
b. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sektor Pemerintah	43
5. Output Nilai Informasi	44
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	45
a. Pengertian Sistem Penendalian Intern Pemerintah (SPIP)	45
b. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	47
c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	54
Penelitian Terdahulu	56
B. Kerangka Konseptual	59
C. Hipotesis Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	62
D. Jenis dan Sumber Data	65
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Variabel dan Pengukuran Variabel	66
G. Instrument Penelitian	68
H. Uji Instrument	70
I. Uji Asumsi Klasik.....	71

J. Teknik Analisis Data.....	72
K. Definisi Operasional	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	78
B. Hasil Penelitian	79
C. Demografi Responden.....	80
D. Uji Instrument	83
E. Analisis Deskriptif	85
F. Hasil Uji Asumsi Klasik	90
G. Hasil Analisis Data	93
H. Pengujian Hipotesis	96
I. Pembahasan.....	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Keterbatasan Penelitian	104
C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Padang	63
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	68
3. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item Total Correlation</i> Terkecil	71
4. Tingkat Pengembalian Responden	80
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	81
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	82
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	82
8. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Penelitian	83
9. Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Penelitian	84
10. Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah	85
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kapasitas Sumberdaya Manusia	86
12. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	88
13. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	89
14. Uji Normalitas Residual	91
15. Uji Multikolinearitas	92
16. Uji Heterokedastisitas	93
17. <i>Adjusted R Square</i>	93
18. Koefisien Regresi	94
19. Anova	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	109
2. Tabulasi Data Pilot Test	112
3. Hasil Analisis Validitas Data Pilot Test.....	116
4. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas Data Penelitian	120
5. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas	124
6. Uji Model	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002:56).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003:15).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002:168) mengidentifikasi sepuluh pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- (1) pembayar pajak (*tax payer*),
- (2) pemberi dana bantuan (*grantors*),
- (3) investor,
- (4) pengguna jasa,
- (5) karyawan atau pegawai,
- (6) pemasok (*vendors*),
- (7) dewan

legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kepala BPKP Sumbar Eddy Mulyadi (padangmedia.com.2011) menilai bahwa Pemda Sumbar telah berupaya memperbaiki opini *disclaimer* pada LKPD Sumbar di tahun 2009 lalu. Terbukti tahun ini LKPD Sumbar telah berhasil memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD 2010. Meski demikian, pemda harus berupaya meningkatkan SDM yang dapat menyusun LKPD yang sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Guna meningkatkan kualitas opini LKPD, BPKP siap memberi pelatihan pada SDM keuangan negara di daerah sehingga bisa menyusun LKPD sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah.

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti tidak ada peningkatan opini dari tahun 2008 sampai 2010. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi menurunnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang di antaranya masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah (BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, 2011).

Di lingkungan Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2010 BPK menemukan beberapa penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah. Temuan BPK itu diantaranya adalah penggunaan langsung atas pendapatan klaim program Jamkesda dan program Jamkesmas 2010 RSUD Padang dan Dinas

Kesehatan Kota (DKK) Padang sebesar Rp 4.185.521,947. Penerimaan RSUD dan DKK yang berasal dari klaim sebesar Rp 4,5 miliar. Dari keseluruhan klaim yang diterima, hanya sebesar Rp 363.792.000 yang dilaporkan dan disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, RSUD dan DKK tidak menyetorkan klaim dari Jamkesmas dan Jamkesda sebesar Rp 4,1 miliar (Padang Ekspres).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan atau andal. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2010).

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Dalam acara sosialisasi program anti korupsi yang digelar BPKP Sumatera Barat untuk fokus grup Bawasda, dijelaskan bahwa pada saat ini pemerintah dalam membuat laporan keuangan dari sisi sumber daya manusia masih banyak bermasalah baik itu dari segi administrasi, tidak memahami peraturan yang ada sampai kepada segi pertanggungjawaban sehingga

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Padang Ekspres, 2011:4). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Indriasari (2008) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Menurut Wahyono (2004:12) informasi harus andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Hal ini sejalan dengan komitmen di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, bernilai informasi, transparan dan akuntabel. Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan

kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume APBN/APBD dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume

transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto, 2001:89). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa setiap pejabat harus bisa menggunakan teknologi, para pejabat dalam menjalankan tugasnya diharapkan menguasai teknologi informasi sehingga berbagai tugas dapat dijalankan dengan baik seperti komputer.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010).

Sistem pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian

tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu : (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 1997) : (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu : (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPIP yang memadai. Tanggungjawab tersebut harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SPI yang

memadai. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi serta pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”**.

Penelitian ini akan dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hal ini terkait dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun Anggaran 2010.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan masalah yaitu :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
4. Apakah kriteria kualitas informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
5. Apakah pelaporan keuangan pemerintah telah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan?
6. Apakah laporan keuangan pokok pemerintah telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah di kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?

2. Sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
3. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris :

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang.
3. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintahan.
2. Bagi dunia pendidikan akuntansi, dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam bidang akuntansi pemerintahan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.
4. Hasil ini dapat diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah terutama bagi pemerintah daerah/SKPD dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern pemerintah yang memadai bagi pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Perkembangan informasi berlanjut sangat cepat, dalam era globalisasi batasan dunia makin tidak jelas, hubungan antar organisasi tidak terbatas hanya dalam satu negara tetapi antar negara. Informasi-informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan makin cepat dan lengkap, antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai. Karena itu baik sektor publik maupun sektor swasta semakin dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan untuk menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan manajemen. Di sisi lain, kegiatan sektor publik maupun swasta semakin luas dan kompleks, terutama sektor publik yang melaksanakan berbagai program sesuai tuntutan masyarakat. Akibatnya makin sulit untuk menyajikan informasi-informasi dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, maka dari itu diperlukan pelaporan keuangan yang transparan.

Menurut Suwardjono (2004:101) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi a) Laporan Realisasi APBN/D, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas, d) catatan atas laporan keuangan, dan e) lampiran Laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Tujuan pelaporan keuangan menurut PP No. 24 Tahun 2005 yaitu : a) Akuntabilitas, b) Manajemen, c) Transparan, dan d) keseimbangan antar generasi.

Menurut Anggraini (2002:21) apabila aktivitas dana suatu pemerintah untuk suatu periode pelaporan telah dicatat, maka data perlu diikhtisarkan untuk tujuan :

- a. Pelaporan bahwa aktivitas telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- b. Pelaporan posisi keuangan kesatuan pemerintah pada akhir periode pelaporan
- c. Pelaporan perubahan (misalnya penghasilan dan pengeluaran) sumber yang dapat digunakan.

b. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

1) Peranan laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

2) Tujuan laporan keuangan

laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan sosial, ekonomi, maupun politik untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dana dan arus kas pemerintah daerah, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan satuan organisasi lainnya dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

d. Dasar Hukum Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- 5) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- 6) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 10) Peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan Rakyat, Pemerintah Pusat, dan Donatur.

e. Konsep Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Pada sektor pemerintahan sebagian besar unit organisasinya dibiayai dari pajak, transaksi-transaksi tertentu dan ada pula yang memperoleh pendapatan dari penggunaan fasilitas dan pelayanan. Agar kegiatan unit-unit pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, maka harus ditetapkan cara pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatannya. Cara untuk menunjukkan pertanggung jawaban antara lain adalah dengan menerbitkan laporan keuangan secara periodik kepada rakyat. Agar laporan dapat dimengerti dan disajikan sesuai dengan ketentuan, diperlukan adanya standar akuntansi yang umum.

Tujuan laporan keuangan sektor swasta untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik lebih rumit karena menyangkut masalah-masalah hukum, ekonomi, sosial dan politik. Sulit untuk menilai apakah sektor publik telah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada rakyatnya.

Jadi laporan keuangan sektor publik harus dapat memenuhi tujuan pertanggungjawaban disamping tujuan manajerial. Hal ini berarti beban yang ditanggung suatu laporan keuangan sektor publik lebih berat dan bervariasi dari pada laporan keuangan sektor swasta karena banyak informasi yang dibutuhkan, baik untuk para manajemen pemerintah, politikus dan rakyat. Kebutuhan informasi tersebut dilatarbelakangi tujuan yang berbeda-beda, bisa untuk tujuan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Tujuan pelaporan keuangan menurut GASB, dibagi dalam dua konsep dasar yaitu : konsep akuntabilitas (*accountability concept*) dan konsep ekuitas antar periode (*interperiod equity concept*). Dalam konsep

akuntabilitas dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi pemakai dalam hal : a) Menetapkan akuntabilitas, b) Membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas digunakan dalam kebijakan publik, tetapi seringkali dalam konteks akuntansi pemerintah, akuntabilitas meliputi :

1. Penyedia informasi mengenai keputusan dan tindakan yang telah diambil selama suatu periode.
2. Adanya pihak luar yang mereview informasi yang disajikan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Sebenarnya akuntabilitas mengandung arti yang lebih luas pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

Konsep ekuitas antar periode merupakan suatu dasar tujuan pelaporan keuangan, dimana pendapatan yang dihasilkan selama periode tertentu dapat mencukupi untuk menutup belanja selama periode tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh GASB, ekuitas antar periode adalah “Suatu tingkatan dimana jasa yang ada selama periode pelaporan tertentu, telah dibayar untuk jasa-jasa yang digunakan dalam periode tersebut”.

Dinyatakan pula bahwa ekuitas antar periode dapat timbul karena :

1. Adanya permintaan anggaran berimbang;
2. Adanya permintaan bahwa setiap defisit yang terjadi dalam suatu periode ditutup pada tahun berikutnya;

3. Adanya penentuan batas waktu untuk persoalan-persoalan hutang.

f. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Manfaat laporan keuangan pemerintah menurut GASB, adalah :

1. Membandingkan realisasi laporan keuangan dengan anggaran yang telah ditentukan;
2. Menentukan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan keputusan yang berhubungan dengan keuangan;
3. Mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi;
4. Untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

Laporan keuangan, dalam hal ini laporan keuangan tujuan umum (*general purpose financial statement*) bukan merupakan satu-satunya sumber informasi keuangan. Dalam banyak hal pemakai laporan perlu tambahan informasi lainnya. Untuk memuaskan kebutuhan informasi dari berbagai pihak secara individual, maka perlu untuk menggabungkan dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Seringkali dengan menggabungkan informasi mengenai pemerintah dengan informasi mengenai aspek-aspek masalah nasional yang diperlukan untuk menilai kegiatan pemerintah yang sedang direncanakan maupun yang lalu. Misalnya informasi mengenai jumlah orang yang bekerja setelah mengikuti program pendidikan tertentu, adalah merupakan informasi yang penting untuk menilai biaya pelatihan yang telah dikeluarkan pada waktu yang lalu maupun untuk perencanaan biaya pelatihan yang akan datang.

2. Nilai Informasi

a. Pengertian Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:165), agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat terpenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai. Serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Pemanfaatan atau pengaplikasian teknologi informasi dalam organisasi juga memiliki peran terhadap pembentukan nilai informasi pelaporan keuangan. Menurut Wahyono (2004:12) informasi yang andal adalah informasi akuntansi yang dapat mendukung bagi pengambilan keputusan. Agar berguna bagi pengambilan keputusan maka informasi tersebut harus memiliki sifat relevan, memiliki nilai prediksi, dan mampu diterapkan untuk keperluan *review* dan koreksi. Sedangkan menurut Jogiyanto (1995:41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterandalan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Komponen sistem komputer mempercepat proses pengolahan data dengan penggunaan *software* dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi.

Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi adalah merupakan produk dari sistem teknologi Informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Lebih efektif karena pengambilan keputusan didasarkan dengan nilai informasi yang andal, tepat waktu, relevan, dan dapat dipahami. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 yang mengatur tentang kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat dalam pengambilan keputusan oleh semua pengguna dan *stakeholder*. Jogiyanto (1995:8) pengembangan dan pemanfaatan

teknologi informasi mutlak diperlukan dalam organisasi terutama dalam menghasilkan nilai informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Wahyono (2004:12) kriteria lain nilai informasi adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi akurat diperlukan komponen pengendalian/kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang di sengaja atau tidak. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Sedangkan menurut Arens dalam Amir (1996:258), manajemen mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian intern dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar pelaporan, misalnya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

Menurut Suwardjono (2005:167) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut :

- 1) Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang
- 2) Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian
- 3) Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai

b. Unsur-unsur Kualitas Informasi

Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Adapun unsur-unsur

pembentukan kualitas informasi dalam Suwardjono (2005:168) adalah sebagai berikut :

1) Keterandalan (*Reliability*)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya karena orang yang akan menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi. Harus disadari bahwa keterandalan mempunyai tingkatan yang bergantung pada kondisi yang melingkupinya.

2) Keterpahaman (*Understandbility*)

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahaman informasi sebagai alat atau perkakas (*tools*). Alat akan bermanfaat bagi pemakai kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat dan pemakai bersedia untuk belajar mengenai kemampuan dan cara kerja alat tersebut. Betapapun canggihnya, suatu alat menjadi tidak bermanfaat kalau pemakai tidak mengetahui gunanya. Sebaliknya, alat yang jelas diketahui gunanya menjadi tidak terpakai lantaran pemakai tidak tahu dan tidak bersedia belajar bagaimana cara menggunakannya.

3) Keberpautan (*Relevance*)

Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan

mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan. Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang dibuat sehingga keputusan yang telah dibuat tersebut tetap dipertahankan atau diubah.

4) Nilai prediktif (*Predictive Value*)

Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan muncul/hasil suatu kejadian masa lalu atau yang akan datang. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif. Dengan kata lain, nilai prediktif adalah kemampuan informasi memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi.

5) Nilai Balikan (*Feedback Value*)

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datang informasi tersebut.

6) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk

mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian tersebut tidak mempunyai nilai lagi. Secara sendiri, ketepatan waktu tidak membuat informasi menjadi berpaut tetapi kurangnya ketepatan waktu dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi.

7) Ketepatan Penyimbolan (*Representational Faithfulness*)

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukuran atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan . dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomi badan usaha berupa sumber ekonomi, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomi dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian (*Verifiability*)

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Proses keterujian dalam akuntansi tidak dengan sendirinya selalu menjamin bahwa suatu informasi mempunyai kualitas ketepatan penyimbolan sebenarnya merupakan konsensus atau ketentuan yang dihasilkan dari proses perekayasaan pelaporan keuangan.

9) Kenetralan (*Neutrality*)

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasaan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakbiasaan berarti bahwa informasi yang disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai

dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat/konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai.

10) Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik (misalnya dua perangkat statement keuangan yang mempresentasikan kegiatan dua badan usaha). Keterbandingan merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat.

11) Materialitas (*Materiality*)

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh atau penghilang/pengabaian atau penyalahsajian tersebut. Pertimbangan materialitas lebih banyak dihadapi oleh manajemen dan auditor di tataran badan usaha (penyajian statement keuangan) daripada oleh perekayasa atau penyusunan standar.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 karakteristik kualitatif informasi didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut antara lain : relevan (*Feedbback Value, Precidtive Value*, Tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverivikasi, netralitas), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

c. Keterandalan

Sebagai aspek pendukung keberpautan, keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan keterandalan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) dan ketepatanwaktuan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mendapatkan keandalan data tanpa mempengaruhi secara material. Dengan begitu keterandalan dapat akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005).

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Tjiptoherijanto

(2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004). Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Tjiptoherjanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kapasitas sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kapasitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Notoadmodjo dalam de Jesus (2006) kualitas SDM menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas fisik dan aspek kualitas nonfisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-

mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya (Ndraha,1997:12). Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (*individual goal*). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara *individual goal* dengan *organization goal*. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya *goal congruence*, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002:50).

Perubahan pendekatan penganggaran dari pendekatan tradisional menuju anggaran berbasis kinerja memerlukan suatu kesiapan dari seluruh organisasi dengan melakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Dalam pelaksanaannya, setiap personel atau SDM yang terkait di dalamnya harus memperoleh kejelasan wewenang dan tanggungjawab serta memperoleh pendelegasian wewenang dan tugas. Selain itu, harus didukung dengan adanya regulasi keuangan, pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan *fair*. Selanjutnya, agar proses perubahan pendekatan penganggaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan sukses, setiap

organisasi juga harus memperhatikan kultur organisasi. Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi (Mardiasmo, 2002:57).

Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi, pada dasarnya bersandar pada penggunaan optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan organisasi (Singh,1997) dalam Mardiasmo (2002:37). Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan berkaitan pula dengan faktor-faktor personal lainnya seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan individu untuk maju. SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan *organizational personality* di mana mereka bekerja.

Kapasitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kapasitas adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam

pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkapasitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan rekrutmen, diklat dan non diklat bukan merupakan langkah yang sederhana, disamping memerlukan waktu yang relatif panjang dan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itulah maka diperlukan suatu upaya yang strategis dan sungguh-sungguh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai komponen terkait di pusat dan di daerah, baik yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah ini tidak dapat berjalan secara mandiri tetapi terkait dengan faktor lainnya, seperti: sistem pembukuan, sistem aplikasi teknologi komputer, inventarisasi aset dan utang, jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggung jawaban

anggaran, dan *quality assurance* atas LKPD oleh pengawas internal. Untuk itulah maka pengembangan kapasitas SDM ini harus selaras dengan perkembangan faktor tersebut.

Kapasitas menurut badan Nasional Sertifikasi Profesi (dalam Noor Fuad & Gofur ahmad, 2009: 23) adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kapasitas erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang mempunyai kapasitas adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus kewenangan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa : Kapasitas adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, staf harus mempunyai kompetensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya.

Kapasitas dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari :

1. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup
2. Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih
3. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas
4. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah

5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Telah melaksanakan proses akuntansi
8. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup
9. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas
10. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

b. Karakteristik Kapasitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan definisi kapasitas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kapasitas. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja superiorlah yang merupakan kapasitas yang dimilikinya. Oleh karenanya kapasitas memiliki karakteristik tertentu.

Spencer & Spencer (dalam Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 24) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kapasitas, yakni sebagai berikut:

- a. *Motives*, merupakan konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah tertentu, seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.

- b. *Traits*, adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
- c. *Self Concept*, merupakan sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.
- d. *Knowledge*, merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlukan dalam pekerjaan.
- e. *Skills*, merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Teknologi Informasi

1) Teknologi

Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem computer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*, misalnya) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliabel

(dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

2) Informasi

Menurut Jogiyanto (1995:11), informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Davis, 2002 (dalam Sidik, 2008) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyadi (1997:11) Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa informasi meliputi unsur-unsur data, pengelolaan data menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang.

3) Teknologi Informasi

Nugroho (2001:14) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan pengaturan sumber informasi. Selain itu teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan memanfaatkan data. Definisi ini dibatasi pada teknologi informasi yang didukung oleh komputer. Menurut Gazali, 2004 (dalam Sidik 2008) mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari teknologi, sebagai berikut :

1) Keunggulan Teknologi informasi

a) Tepat waktu dan akurat

Dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer maka hasil outputnya dalam bentuk informasi dapat disajikan tepat waktu dan data yang didapat akurat.

b) Untuk pengambilan keputusan

Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan karena prosesnya cepat.

c) Digunakan untuk berbagai integrasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk integrasi kerja baik itu integrasi vertikal maupun horizontal.

d) Memperoleh informasi yang kompetitif

Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang kompetitif.

e) Informasi yang bermanfaat

Teknologi informasi menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna dan dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain.

f) Penyajian data cepat

Teknologi informasi mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2) Kelemahan Teknologi Informasi

Kelemahan dari teknologi adalah apabila terjadi suatu kesalahan dalam pengelolaan data akan berakibat fatal bagi informasi yang disajikan. Oleh karena itu harus ada sistem *protection* yang kuat untuk melindungi dokumen-dokumen penting dan adanya pembatasan akses terhadap suatu jaringan. Maka diperlukan orang tertentu yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan dibutuhkan biaya yang besar untuk penerapan sistem perlindungan tersebut.

Peran teknologi informasi semakin penting dikarenakan kita sudah memasuki era informasi (*information Age*). Era informasi, komputer digital dan jaringan (*network*) mengubah konsep ekonomi yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga timbul istilah *Digital Network, Economy Network*. Kesuksesan penggunaan teknologi informasi sangat tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian yang memadai dari personil EUC (*End – User Computing*) menyebabkan aktivitas EUC yang antara lain berupa pengelolaan data (*Word Processing*), komunikasi elektronik (*Electronic Communication*), dan aktivitas otomatisasi lainnya yang dapat berjalan dengan baik.

Jogiyanto (1995:91) Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, Jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari

teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Penerapan sistem informasi seringkali harus menggunakan komputer, begitu pula sistem informasi akuntansi di pemerintahan juga memberikan peranan pada komputer sebagai media untuk meningkatkan nilai informasi akuntansi. Penggunaan komputer mengidentifikasi perlunya penerapan teknologi informasi yang lebih luas. Teknologi informasi mencakup penggunaan *software* dan *hardware* dengan tetap berpegang pada kompleksitas dan kebutuhan sistem.

Warsoko (2007:51) menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa pengguna komputer sangat penting karena alasan *pertama*, tentang kemampuan komputer untuk mengolah data. Ciri-ciri kemampuan komputer dapat diuraikan sebagai berikut : pengolahan yang tepat, akurasi yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, efektif untuk tugas berulang, dapat berfungsi hampir secara terus menerus, teliti dalam mendeteksi situasi yang menyimpang, dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Alasan *kedua*, komputerisasi sudah tersedia dimana saja dan dapat diperoleh dengan mudah dengan biaya relatif murah. Namun apabila kemampuan keuangan suatu organisasi telah memungkinkan untuk menyelenggarakan sistem informasi berbasis komputer organisasi tersebut tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan yang mengharuskan pengelolaan data yang cepat, efektif, dan efisien.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sektor Pemerintahan

Menurut Jogiyanto (1995:12) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasar frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yng dijalankan. Menurut Jogiynto (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002:214) pemanfaatan teknologi adalah tingkatan integrasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi di sektor pemerintahan terdiri dari, yaitu :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan SKPD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja SKPD
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan pelaporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan pemerintah menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 6) Laporan akuntansi sektor pemerintahan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin kompleks dan rumit.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:89) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

5. Output Nilai Informasi

Wahana komputer, (2003) (dalam indriasari, *et al*, (2008), pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan berupa dapat membantu mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan

komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis, output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 60 Tahun

2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan.

Pengendalian intern menurut Widjajanto (2001:18) adalah sebagai berikut :

“Pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk : 1) mengamankan aktiva perusahaan, 2) mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, 3) meningkatkan efisiensi, dan 4) mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Sedangkan menurut Arens dalam Amir (2006:258) sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Salah satu tujuan dan sasaran manajemen yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Manajemen bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa

informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

b. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Arens (2008:375) *internal control* yang dikeluarkan *Commintee of Sponsoring Organization* (COSO), yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang untuk mengimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP meliputi hal-hal berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di Inspektorat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan

intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan Inspektorat. Di dalam lingkungan pengendalian yang baik, kemampuan untuk menilai risiko juga akan baik. Inspektorat wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan di Inspektorat menetapkan tujuan pada tingkatan organisasi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. Inspektorat wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Inspektorat. Kegiatan pengendalian terdiri atas *review* kinerja; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi

Unsur-unsur pengendalian yang lain akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di Inspektorat mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan Inspektorat secara umum dapat dicapai. Inspektorat wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Inspektorat sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di Inspektorat berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern di Inspektorat adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Inspektorat wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

PP No. 60 tahun 2008 ini juga merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada dalam Pasal 58 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), baik yang ada di Pemerintah (Pusat) maupun di Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP maka PP No. 60 tahun 2008, dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 3, maka setiap Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP. Pengujian kualitas pengendalian intern harus dilakukan dalam tingkatan umum yaitu untuk tingkatan organisasi Instansi Pemeirntah secara keseluruhan, maupun dalam tingkatan yang lebih rendah atau khusus seperti pengendalian intern untuk suatu unit, fungsi, atau proses yang ada atau berjalan dalam Instansi Pemerintah tersebut.

Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi

birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

Menurut Mahmudi (2007) dalam Indriasari (2008) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut:

1) Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah

Merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal Nomor 58 Tahun 2005) : (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) sistem dan prosedur akuntansi aset, dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

2) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggungjawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

3) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam prosedur audit keuangan.

4) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh suatu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, unsur atau elemen pengendalian intern terdiri dari yaitu :

- 1) Pasal 232 ayat 1 entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan
- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana pada ayat 1 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- 3) Proses akuntansi didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambahkan dengan buku besar pembantu.
- 4) Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan pedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.
- 5) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran digunakan dan disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.
- 6) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- 7) Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- 8) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke buku besar dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada akhir setiap periode sesuai dengan kebutuhan. Dan saldo setiap akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
- 9) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 10) Adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD antara pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini sejalan dengan lima tujuan pengendalian sesuai dengan *General Standar 300. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of Internal Auditor (IIA)* dalam Audit Internal Pemerintah yaitu :

1. Dapat dipercayanya dan integritas informasi di era globalisasi ini, sistem informasi menjadi begitu penting bagi organisasi dalam rangka mensikapi perubahan yang serba cepat dalam perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnya kecanggihan sarana teknologi informasi. Umumnya, sistem informasi dibagi ke dalam 2 (dua) aspek, yakni : (a) informasi akuntansi finansial yang menghasilkan

laporan keuangan organisasi dan berbagai laporan lainnya seperti penggunaan anggaran atas budget; dan (b) sistem informasi kegiatan yang menghimpun informasi terkait dengan berbagai aspek kegiatan yang menghasilkan laporan tingkat keberhasilan kinerja. Tujuan pengendalian intern untuk menjaga agar dapat dipercayanya dan integritas sistem informasi sangat penting untuk proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

2. Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan.

Salah satu cara yang dipakai manajemen untuk menjaga pengendalian intern adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan, rencana, dan prosedur. Undang-undang biasanya ditetapkan diluar organisasi. Tujuan dari pengendalian-pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatu operasi berjalan dengan baik, sistematis, dan berurutan. Kegagalan untuk mematuhi pada pengendalian-pengendalian ini akan memgganggu usaha yang terkoordinasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan.

3. Pengamanan aktiva pengendalian yang nyata adalah desain dan implementasi untuk melindungi aktiva/aset pemerintah.

4. Ekonomis dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Konsep dasar dalam dunia ekonomi menyatakan bahwa sumber daya adalah langka. Artinya, ketersediaan atas sumber-sumber ini terbatas, padahal sumber sumber ini dipakai untuk kebutuhan yang tidak terbatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Prinsip dasar yang harus ditetapkan adalah menggunakan sumber daya yang terbatas

seekonomis dan seefisien mungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

5. Efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atas program dan kegiatan. Fokus seluruh pengendalian harus pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan organisasi tersebut akan diterjemahkan kedalam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh organisasi. Dengan demikian efektivitas atas kegiatan dan program akan mengarah kepada tujuan organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sumber daya manusia ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di Instansi Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widinyaningrum (2010) yang berjudul Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi menunjukkan bahwa SDM dan Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemda melalui pengendalian intern akuntansi, Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemda,

sedangkan SDM tidak berpengaruh dimana penelitian ini studi empirisnya di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari, *et al.* (2008) pada Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2003 (dalam Indriasari, *et al.* 2008) berhasil mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan yaitu tingkat sistem, lembaga, dan individu. Hasil perangkaian dari permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di Indonesia. Sebuah tulisan di Media Indonesia (2006:1) menyebutkan bahwa dari 19.760 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya.

Dari penelitian Harifan (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh

signifikan positif terhadap Nilai Informasi (Keterpahaman) Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang.

Dari penelitian Muliani (2000) menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang akuntansi manajemen. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Oleh sebab itu peneliti juga menguji apakah penerapan teknologi informasi juga mempunyai dampak positif terhadap penciptaan nilai informasi pada manajemen pemerintahan, terutama dalam hal pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Soetanto (2007) membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada implementasi basis data *Program financial Accounting and Monitoring System* (PFAMS). Penelitian ini dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan prasarana kota terpadu, yaitu pemerintah, konsultan, dan auditor di Jawa Timur. Hasil

penelitian Soesanto menunjukkan bahwa kualitas nilai informasi akuntansi sistem yang berbasis data PFAMS pada proyek terpadu di Jawa Timur secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kualitas lembaga pengelola, kualitas sarana dan prasarana, dan kemudahan data. Kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh kualitas operator yang didefinisikan oleh pengalaman dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan khususnya sistem informasi akuntansi berbasis PFAMS memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas informasi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumberdaya yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Kebutuhan dukungan teknologi dan sumber daya manusia harus sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan akuntansi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

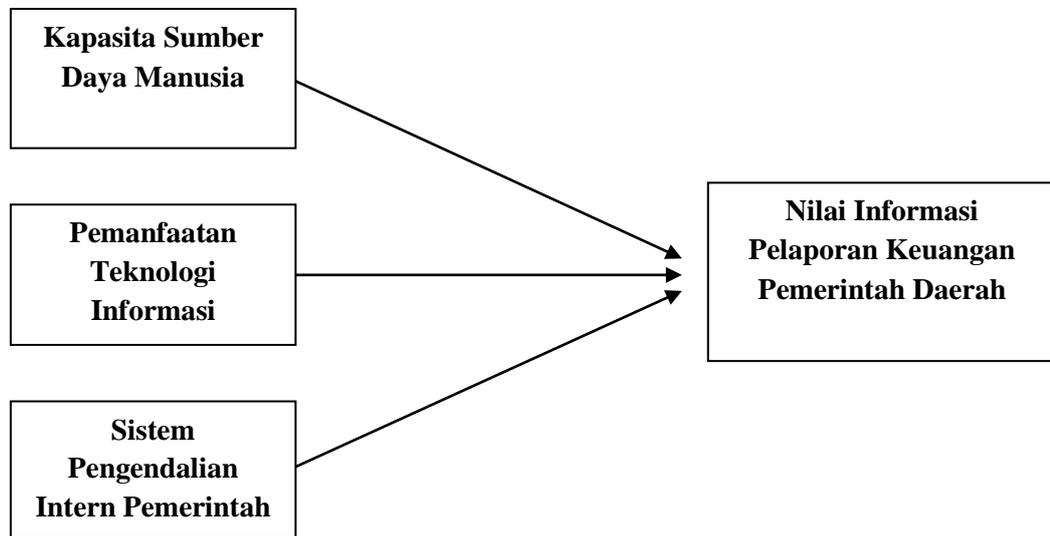
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk dapat menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Dimana variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah sebagai variabel dependen, serta kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian

intern pemerintah sebagai variabel independen. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai) agar informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang memiliki nilai, yaitu keandalan. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu untuk menghasilkan informasi yang lebih valid karena dengan adanya volume transaksi yang semakin besar apabila tidak diimbangi dengan pemanfaatan teknologi informasi bisa berpengaruh terhadap keterandalan dalam penyajian laporan keuangan. Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/niai informasi. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern pemerintah, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah.

Untuk lebih jelas kaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan skema konseptual sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
- H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah
- H3 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah serta pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuisioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang

bernilai informasi dan bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

2. Pada peneliti berikutnya supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuisioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/ Pernyataan yang sama, dan peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, misalnya seperti : wilayah/lokasi pemerintahan yang terpadu dan kejelasan sistem/desain perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.